

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Tengah

Effects of Government Expenditures and Job Opportunities on Economic Growth and Poverty in Central Kalimantan Province

Sondang Naully Hasibuan¹, Gundik Gohong², Misel Jaya³

¹Student of the Master of Economics in Palangka Raya University

^{2&3}Department of Economics, Economics and Business Faculty, University of Palangka Raya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder time series tahun 2010-2016. Data dianalisis menggunakan analisis Jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menemukan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kata Kunci : pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of government spending and employment opportunities on economic growth and poverty in Central Kalimantan Province. The research method is quantitative by using secondary time series data from 2010-2016. Data is analyzed using path analysis. The results found that government expenditure had a significant effect on economic growth in Central Kalimantan Province, government expenditure does not have a significant effect on poverty in Central Kalimantan Province, job opportunities have a significant effect on economic growth in Central Kalimantan Province, job opportunities have a significant effect on poverty in Central Kalimantan Province, so the Prob (0.004). Economic growth has a significant effect on the level of poverty in Central Kalimantan Province, so the Prob (0.001). Government expenditure does not have a significant effect on poverty levels through economic growth in Central Kalimantan Province, so Prob (-0.724). Job opportunities have a significant effect on poverty levels through mediating economic growth in Central Kalimantan Province, so Prob (1,198).

Keywords: Government Expenditures, Job Opportunities, Economic Growth and Poverty

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai “motor” dan pemerintah Provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif dapat diterapkan (Sjafrizal, 2009).

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian dan proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, sampai studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental.

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pada Pasal 1 ayat (16) disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 20 ayat (3) menyebutkan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini lebih mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman (Guritno, 1999).

Sejak tahun 2007, struktur belanja pemerintah daerah mengalami perubahan dari belanja publik dan aparatur menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan antara belanja langsung dan tidak langsung, terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program. Pada Tabel 1.1 dibawah memberikan gambaran jumlah proporsi belanja langsung dan belanja tidak

langsung terhadap belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 yaitu:

Tabel 1.1
Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (dalam jutaan Rp)

Tahun	Belanja Langsung	%	Belanja Tidak langsung	%	Total Belanja Daerah
2011	812.290.457	53,29	712.053.813	46,71	1.524.344.270
2012	1.122.281.366	47,73	1.229.065.954	52,27	2.351.347.320
2013	1.566.774.812	53,50	1.361.950.809	46,50	2.928.725.621
2014	1.750.774.460	54,11	1.485.025.739	45,89	3.235.800.199
2015	1.833.317.040	52,64	1.649.116.750	47,36	3.482.433.790

Sumber : BPS Kalimantan Tengah, dari berbagai tahun terbitan (data diolah)

Selama tahun 2011-2015 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah meningkatkan belanja daerahnya tiap tahunnya. Belanja Daerah tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung terlihat pada tabel diatas.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah (Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah, 2004) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang

bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama lima tahun (2011-2015) mengalami fluktuasi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,38 persen dan terendah pada tahun 2014 sebesar 6,21 persen. Proses pembangunan ekonomi daerah telah berhasil menciptakan laju pertumbuhan

rata-rata sebesar 6,89 persen per tahun. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut karena didukung oleh peningkatan seluruh sektor-sektor yang memiliki peranan cukup besar dalam pembentukan PDRB. Gambaran tersebut ditunjukkan seperti pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Data PDRB Provinsi Kalimantan
Tengah 2011 – 2015
Atas Harga Konstan 2010

No	Tahun	PDRB (Juta)	Pertumbuhan (%)
1	2011	60 492,9	7,01
2	2012	64 649,2	6,87
3	2013	69 411,0	7,38
4	2014	73 724,9	6,21
5	2015	78 890,0	7,21

Sumber: BPS Kalteng, Kalteng Dalam Angka, 2015 (data diolah)

Adapun sektor-sektor yang mendukung tingginya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah meliputi 3 (tiga) sektor yaitu (a) Sektor pertanian, peternakan, kehutanan/perikanan, (b) Sektor pertambangan dan penggalian, dan (c) Sektor industri pengolahan. Ketiga sektor ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan berperan cukup besar dalam pembentukan PDRB Kalimantan Tengah.

Peranan atau fungsi pemerintah diungkapkan oleh Mangkoesobroto (1999) ada 3 (tiga) meliputi *pertama* peran alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi; *kedua* peran distribusi, yaitu peran pemerintah dalam mengusahakan agar

alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien; *ketiga* peran stabilisasi, yaitu peran pemerintah sebagai alat stabilisasi perekonomian.

Pengeluaran pemerintah melalui belanja publik (pembangunan) Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perubahan dengan *trend* meningkat dari tahun ketahun. Diperkirakan dapat memacu pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur ekonomi. Dengan demikian pengeluaran pemerintah yang berbentuk belanja pembangunan (belanja publik) diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari modal atau tenaga kerja dan teknologi. Penyediaan sumber daya modal sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber dana ini diwujudkan dalam bentuk penanaman modal (Investasi). Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maupun kesempatan kerja. Dana investasi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat (swasta), pinjaman luar negeri serta investasi swasta asing (Sukirno, 2002).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kemajuan

ekonomi suatu negara. Menurut Kuznets bahwa pertumbuhan ekonomi mengandung makna kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro (2000) dan Smith (2003)).

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ahli - ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Pertumbuhan penduduk terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang memandang sebagai faktor produksi, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (*labour force*). Semakin banyak angkatan kerja (tenaga kerja) semakin meningkat tenaga produktif, sehingga akan meningkatkan produksi.

2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik, Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan,

sedangkan faktor teknologi dianggap konstan (tidak berubah).

2.4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah diartikan sebagai alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah ini setiap tahunnya ditujukan pada berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat/masyarakat melalui bermacam-macam program yang telah dibuat. Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta (Suparmoko, 1998).

2.5. Teori Kesempatan Kerja

Model kesempatan kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik mengemukakan pandangan mereka mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Sementara keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (*equilibrium with full employment*) hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas. Jadi

adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas tanpa campur tangan pemerintah itu merupakan *necessary condition* bagi tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh. Keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh tersebut menurut kaum klasik merupakan kondisi yang ideal atau normal dari suatu perekonomian. Jika sampai terjadi pengangguran di dalam perekonomian, maka hal tersebut hanyalah gejala atau fenomena yang bersifat sementara. Dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui bekerjanya secara bebas mekanisme pasar.

2.6. Teori Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan yang dimaksud adalah salah satu ukuran atau batas dipisahkannya masyarakat miskin dan non-miskin. Kasus Indonesia secara umum memakai standar pengukuran kemiskinan dari standar Bank Dunia. Namun beberapa pendekatan atau tepatnya penyesuaian dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas miskin.

2.7. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini dinyatakan dalam pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pembangunan tersebut digunakan untuk memberdayakan

berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Pengeluaran pembangunan juga merupakan salah satu input produksi yang dapat menghasilkan output.

2.8. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

2.9. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Mankiw (1995) menyatakan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi, sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Sukirno (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi

pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

Syaifuddin (2007:35) mengatakan bahwa pertumbuhan pada sektor jasa di pedesaan menurunkan kemiskinan disemua sektor dan lokasi. Namun pertumbuhan jasa di perkotaan memberikan nilai *elastisitas* kemiskinan yang tinggi dari semua sektor kecuali pertanian perkotaan. Selain itu pertumbuhan pertanian dipedesaan memberikan dampak yang besar terhadap penurunan kemiskinan disektor pertanian pedesaan, yang merupakan contributor terbesar kemiskinan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah dan Angkatan Kerja pada 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2016. Pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan dan Kemiskinan pada 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2016.

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara

operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable bebas dan variable terikat. Variabel-variabel tersebut dijelaskan berikut.

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi dan menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *locus of control* dan kepribadian.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variable bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja. Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi (Y_2) adalah pertambahan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Tengah dan dinyatakan dalam persen.
- 2) Pengeluaran Pemerintah (X_1) adalah Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah dan dinyatakan dalam persen.

- 3) Kesempatan Kerja (X_2) adalah orang yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah dan dinyatakan dalam persen.
- 4) Kemiskinan (Y_1) adalah jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan dinyatakan dalam persen.

Penelitian ini terbatas pada kegiatan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2010 sampai dengan 2016.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan perhitungan secara keseluruhan pengaruh pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dibuat rangkuman pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Koefisien Analisis Jalur

Hubungan Variabel	Koefisien	t hitung	P	Ket
Pengeluaran Pemerintah → Pertumbuhan Ekonomi	0,301	1,039	0,001	Sig
Kesempatan Kerja → Pertumbuhan Ekonomi	0,002	3,202	0,002	Sig
Pengeluaran Pemerintah → Kemiskinan	0,025	0,696	0,008	Sig
Kesempatan Kerja → Kemiskinan	0,072	-2,043	0,004	Sig
Pertumbuhan Ekonomi → Kemiskinan	-0,631	-3,578	0,001	Sig
Pengeluaran Pemerintah → Pertumbuhan Ekonomi → Kemiskinan	-0,013	-0,724	0,018	Sig
Kesempatan Kerja → Pertumbuhan Ekonomi → Kemiskinan	-0,038	1,918	0,020	Sig

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Merujuk pada tabel 4.1 mengandung makna bahwa:

- 1) Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimungkinkan mengingat pengeluaran pemerintah banyak dilakukan pada pos-pos bagi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengeluaran pemerintah juga lebih banyak pada perbaikan infrastruktur, sehingga peningkatan infrastruktur itu memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat yang menggunakan infrastruktur tersebut saat melakukan kegiatan ekonomi.
- 2) Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan sejak tahun 2007 struktur belanja pemerintah daerah mengalami perubahan dari belanja publik dan aparatur menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan antara belanja langsung dan tidak langsung terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program. Selain itu selama tahun 2010-2014 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan belanja yang cukup signifikan, sehingga pengeluaran pemerintah cukup berpengaruh terhadap kemiskinan.
- 3) Kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan kesempatan kerja merupakan peluang yang

diciptakan oleh pemerintah melalui berbagai investasi dan pengeluaran pemerintah, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pengalaman perekonomian Asia Timur dan Asia Tenggara menekankan pada pentingnya suatu kebijakan publik yang dinamis dan peran aktif dari negara yang bersangkutan dalam menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terselenggaranya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan juga memperbaiki pendapatan publik dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk prasarana fisik dan sosial, sehingga membantu mengurangi kemiskinan serta memperbaiki potensi produktif perekonomian (Saddarmaningsih, 2007).

- 4) Kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan memberikan dampak terhadap kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu mengurangi angka kemiskinan. Diperkuat oleh Sumodiningrat (1996) bahwa sumber daya manusia mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai-nilai ekonomis, dimana kegiatan yang dilakukan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Dikatakan lebih lanjut sasaran pembangunan daerah melalui berkembangnya otonomi yang nyata, dinamis dan serasi, serta bertanggungjawab dengan menitikberatkan pada daerah, mampu meningkatkan kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan, mengelola pembangunan, mengkoordinasi pembangunan antara sektor dan daerah, serta antara sektoral dengan pembangunan daerah.

- 5) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB. Hal ini didukung juga oleh kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara yang berlaku di berbagai negara dipengaruhi faktor utama yaitu kekayaan sumber alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Makanya peningkatan PDRB berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
- 6) Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan banyaknya pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk

pembangunan infrastruktur pemerintah, sehingga tidak cukup banyak bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kesempatan kerja, sehingga perekonomian masyarakat tidak dapat berkembang baik dan menurunkan angka kemiskinan.

- 7) Kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 berjumlah 1.070.210 jiwa. Tahun 2012 jumlah angkatan kerja 120.505 jiwa, dimana mengalami penurunan yang sangat significant dari tahun sebelumnya dan terus pada tahun-tahun berikutnya mengalami fluktuasi. Kondisi tahun 2015 jumlah angkatan kerja di Kalimantan Tengah berjumlah 1.272.461 jiwa. Dengan demikian jumlah tenaga kerja yang tersedia di Provinsi Kalimantan Tengah cukup besar. Besarnya jumlah tenaga kerja tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena akan meningkatkan produktivitas dan menghasilkan *output* yang tinggi pula yang pada gilirannya pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat tentu akan meningkatkan pula daya beli, sehingga pertumbuhan ekonomi

suatu daerah akan menjadi lebih baik. diperkuat oleh Mankiw (1995:158) yang menyatakan adanya pertumbuhan ekonomi terdapat meningkatkan produksi, sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut: (1) Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, (2) Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, (3) Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, (4) Kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, (5) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, (6) Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, (7) Kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya merujuk hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah diharapkan semakin meningkatkan atau memperbaiki akses perekonomian khususnya dibidang infrastruktur perekonomian seperti pasar dan jalan yang menjadi akses utama perekonomian masyarakat, sehingga dengan Bergeraknya ekonomi masyarakat akan semakin menurunkan tingkat kemiskinan; (2) Pemerintah juga diharapkan untuk mengembangkan ekonomi daerah, sehingga memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk dapat terserap pada lapangan kerja dan berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan pada masyarakat; (3) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln dan Soeratno. 2008, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit BPF.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis*. Edisi Pertama, Cetakan Keenam. Yogyakarta. BPF.

Gujarati, D. 1999. *Essential of Econometrics.*, McGraw-Hill. Inc. Second Edition, London.

Iradian, Garbis. 2005, "Inequality, Poverty and Growth : Cross-Country Evidence". *IMF Working Paper*.

Jamco, Muhammad Taher. 2008. "Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara, 2002-2006". *Tesis S2*. Yogyakarta. Sekolah Pascasarjana UGM.

Jongwanich, Juthathip. 2007. *Worker's Remittances, Economic Growth and Poverty in Developing Asia and Pacific Countries*. United Nation Economic and Social Commission for the Asia and Pacific Countries (UNESCAP) *Working Paper*.

Kementrian Koordinator Bidang Kesra. 2008. *8 Walikota Tolak Program Penanggulangan Kemiskinan*, www.menkokesra.go.id

Kifli, Sofia. 2007. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Propinsi Lampung, Tahun 2000–2005". *Tesis S2*. Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan*